

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif percepatan pertumbuhan penduduk adalah ketika kebiasaan konsumsi masyarakat meningkat maka timbulan sampah juga meningkat (Muhammad dkk, 2022). Meningkatnya jumlah sampah akan menjadi masalah bahkan dapat menimbulkan bencana apabila tidak ada pengelolaan yang baik. Belum adanya perencanaan dalam pengolahan sampah mengakibatkan kurang maksimalnya sistem pengolahan sampah. Selain itu, belum adanya tempat pengolahan sampah menjadi permasalahan yang mendasari hal tersebut (Nilam, 2016).

Menurut Tobing dalam Sari 2016, salah satu pencemaran lingkungan ialah bertambahnya populasi manusia yang mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah yang dibuang. Hal ini diperburuk dengan kurang memadainya tempat dan lokasi pembuangan sampah, kurangnya kesadaran dalam mengelola sampah, serta keengganan masyarakat mendaur ulang sampah. Berbagai hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Menurut Khoiriyah (2021) Masalah terkait sampah ada tiga bagian. Bagian hilir terdiri dari jumlah pengolahan limbah yang selalu bertambah, bagian proses terdiri dari sumber daya kota dan pemerintah yang terbatas, dan bagian hulu terdiri dari sistem yang kurang optimal. Pengolahan akhir pengelolaan sampah. Kebanyakan orang menganggap membakar sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah. Namun hal ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar dan berdampak

pada kesehatan masyarakat. Permasalahan yang lainnya diakibatkan oleh kesadaran warga yang rendah sehingga sampah sering dibuang kemana-mana.

Menurut definisi yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada Bab I Pasal 1, disebutkan bahwa sampah merujuk kepada sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berwujud padat. Saat ini, sampah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat karena dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup. Sampah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi dan kegiatan manusia lainnya dapat mengandung zat pencemar yang memengaruhi kebersihan lingkungan dan kesehatan manusia. Menurut Soemirat (2004), beberapa faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah:

1. Jumlah penduduk

Hal tersebut dapat dipahami dengan mudah, bahwa semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula jumlah sampahnya. Pengelolaan sampah inipun berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

2. Keadaan sosial ekonomi

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah per kapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan.

Peningkatan kesejahteraan juga akan mengakibatkan peningkatan aktivitas konstruksi dan renovasi bangunan, serta peningkatan dalam transportasi. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan produksi

produk pertanian, industri, dan sektor lainnya, yang berkontribusi pada peningkatan volume dan jenis sampah.

### 3. Kemajuan teknologi

Perkembangan teknologi akan meningkatkan jumlah dan kualitas sampah karena variasi bahan baku yang digunakan semakin beragam, serta beragamnya metode pengepakan dan produk manufaktur.

Firman Allah SWT terkait hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum Ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Sampah akan menjadi nilai ekonomi apabila kita dapat mengelolanya dengan baik. Dalam mengatur perilakunya, manusia membutuhkan waktu. tak jarang manusia pada umumnya dengan sengaja membuang sampah sembarangan. Tanpa disadari bahwa tindakannya merupakan bagian dari dosa. Strategi pengelolaan sampah dalam membangun kepedulian Masyarakat perlu diciptakan untuk dapat memanfaatkan sampah sebagai material yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan sampah melalui peningkatan ekonomi Masyarakat merupakan bagian dari pentingnya menjaga lingkungan. Hal tersebut sebagai harapan agar sampah tidak menjadi sesuatu yang sia-sia sekaligus terciptanya tempat yang bersih dan ramah lingkungan.

Timbulan sampah perlu penanganan yang bijak berdasarkan jumlah masyarakat, kegiatan serta jenisnya. Penanganan ini pada dasarnya merupakan kebijakan terkait sampah yang tetap mempunyai nilai jual sebelum sampah tersebut

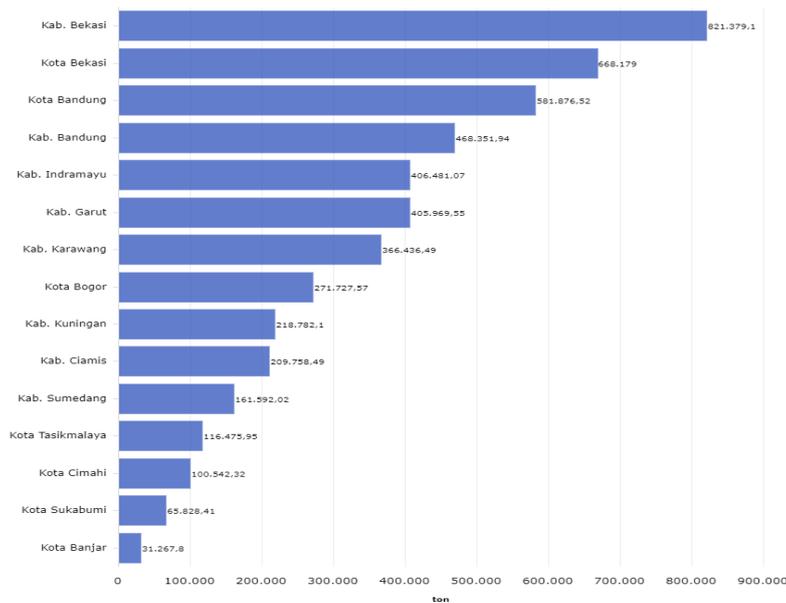
diletakkan pada tempat buangan sampah. Penanganan sampah di setiap daerah memberikan pengaruh yang amat signifikan terhadap kelola sampah pada tahap selanjutnya.

Seharusnya pengelolaan sampah ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan, mengacu pada Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008. Sistem pengaturan bidang persampahan ini lebih dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 81 terkait persampahan perkotaan serta pengelolaan persampahan perkotaan, yang mengatur jika penghasil sampah harus mengurangi dan mengolah sampah di sumbernya sedemikian rupa hingga kebijakan itu mencakup kriteria non teknis yang merupakan kontribusi masyarakat.

Menurut *Sustainable Development Goals* (SDG) juga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, yang bertujuan untuk mengurangi sampah perkotaan juga sampah domestik sebesar 30 persen, pengolahannya adalah 70 persen Tujuan nasional terbilang sulit dicapai. Pengolahan pada sampah tak sekedar mengenai masalah teknis serta sistem pengolahannya akan namun menyangkut masalah perilaku masyarakat, dalam arti pengelolaan sampah tak bisa ditangani tanpa ada keikutsertaan aktif oleh masyarakat daerahnya dalam hal melakukan *reused* (menggunakan ulang), *reduce* (mengurangi volume) dan *recycle* (mendaur ulang). Salah satu perilaku warga sekitar yaitu persepsi masyarakat mengenai pengolahan sampah, persepsi ini amat berpengaruh bagi pengelolaan sampah dikarenakan apabila persepsi masyarakat itu bagus maka partisipasi ataupun ikut serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah pun akan baik karena partisipasi oleh banyak pihak adalah kunci kesuksesan sebuah program atau aktifitas (Ningtyas, 2022). Ketika sikap atau persepsi masyarakat terkait sampah masih terbilang rendah, dalam artian mengatakan bahwa sampah adalah sesuatu

yang wajib dibuang sebab sudah tidak memiliki manfaat. Maka dari itu, persepsi masyarakat terhadap Sampah patut dirubah berdasarkan barang yang tidak bermanfaat menjadi produk yang mempunyai nilai guna serta manfaat (Luanmasaret et al, 2022).

Ditinjau dari penelitian sebelumnya oleh (Octawirawa, 2004) mengenai cara pandang membuang sampah warga sekitar didasarkan oleh jumlah penduduk. Dalam pemilihan daerah studi, Peneliti tidak serta merta menentukan tingkat kepadatan penduduk, namun juga memperhatikan jarak wilayah studi dari pusat kota, tingkat kesulitan pengangkutan sampah dan kondisi lingkungan yang ada dari hasil observasi lapangan.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

### Gambar 1.1

Volume Timbunan Sampah di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Wilayahnya (2022)  
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume timbunan sampah di Jawa Barat tercatat mencapai 4,89 juta ton pada 2022 atau ketiga terbesar di Indonesia. Kabupaten Bekasi mengantongi timbunan sampah terbanyak di Jawa

Barat dengan bobot 821,37 ribu ton atau sekitar 16,78% dari total sampah di provinsi tersebut. Dari beberapa kota yang terdapat di Jawa Barat, Indramayu menempati urutan 5 besar penyumbang timbunan sampah dengan volume 406,48 ribu ton yang jika di rinci berdasarkan rata-rata timbulan sampah harian sebesar 1.113,65 ton/hari.

**Tabel 1.1**

Jumlah Timbunan Sampah Kota Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat  
Tabel 11 Jumlah Timbunan Sampah Kota Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

<b>Kode Provinsi</b>	<b>Nama Provinsi</b>	<b>Kode Kabupaten</b>	<b>Timbunan Sampah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun</b>
32	Jawa Barat	3212	1572,26	Ton/hari	2016
32	Jawa Barat	3212	1674	Ton/hari	2017
32	Jawa Barat	3212	2771,7	Ton/hari	2018
32	Jawa Barat	3212	1077	Ton/hari	2020
22	Jawa Barat	3212	792,48	Ton/hari	2021

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2021

Pada periode 2006 hingga 2019, kabupaten Indramayu mendapatkan 11 Penghargaan Adipura. Tetapi dengan didapatkannya peraih tersebut tidak berarti membebaskan kabupaten Indramayu oleh problema sampah dan pengelolaannya. Sanitasi Indramayu periode 2013 menyebutkan bahwa pencapaian layanan pengelolaan sampah di Indramayu masih di angka 8%, jauh dibawah pencapaian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 14/2010 sebesar 70%. Minimnya jumlah tersebut disebabkan terbatasnya prasarana dan sarana yang kurang sesuai pada jumlah sampah yang terangkut dan tertimbun di tempat pembuangan sementara (TPS). Pada akhir tahun 2018, Kabupaten Indramayu menghasilkan sampah sebanyak 415,02 ton per hari, sedangkan sampah yang dikelola Pemda Kabupaten

Indramayu melalui pengelolaan sampah sebanyak 426,90 ton per hari (39,86% pengolahan) dan pengurangan sampah perkotaan melalui bank sampah, TPS 3R, TPST. 67,30 ton/hari (turun 6,28%). Secara regional pelayanan persampahan meliputi 24 (dua puluh empat) kecamatan yang dilayani oleh 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu.

Meningkatnya jumlah timbunan sampah dapat berakibat pada lahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang semakin sempit dan berkurang, dalam hal ini dibutuhkan keikutsertaan Masyarakat dalam membantu pemerintah yang melakukan program pengelolaan sampah untuk mengurangi semaksimal mungkin peningkatan volume sampah,. Selain itu, pemerintah harus dengan bijak dalam mengambil Keputusan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur pengelolaan sampah yang baik dan ekonomis, termasuk pengelolaan sampah terpadu berdasarkan prinsip *3R (Reduce, Reuse, Recycle)*. Pengendalian yang diterapkan dalam UU No.18 juga menjelaskan bahwa diperlukan kerja sama masyarakat dan pemerintah agar kegiatan ini berhasil. Pengelolaan sampah yang efisien dan efektif dapat mengurangi jumlah total sampah dari hulu hingga hilir. Hal ini memerlukan peningkatan kepercayaan masyarakat. Ketika kesadaran ini tercipta, pengelolaan sampah dapat mengurangi jumlah sampah secara keseluruhan dan mengatasi keterbatasan ruang TPA.

Penelitian mengenai peningkatan pengelolaan sampah terutama di Kabupaten Indramayu harus perlu dilakukan. Ketika melibatkan seluruh masyarakat dalam perbaikan pengelolaan sampah, perlu diketahui terlebih dahulu berapa besaran kesediaan pedagang untuk membayar untuk memperbaiki pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perlu dikaji kesediaan membayar penjual dan sejauh mana manfaat yang dapat dikelola dari jumlah yang dibayarkan atau kesediaan membayar. Kesediaan membayar adalah jumlah yang bersedia dibayar seseorang untuk jasa lingkungan

(Nainggolan, 2019). Salah satu cara mengetahui nilai kemauan membayar pedagang untuk membayar adalah dengan *Contingent Valuation Method (CVM)*

Metode Penilaian Kontingensi (*Contingent Valuation Method*) adalah sebuah teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai sumber daya alam dan lingkungan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada konsumen mengenai nilai manfaat yang mereka rasakan dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Nilai dari sumber daya alam ini diestimasi melalui pengukuran Kesiediaan untuk Membayar (*Willingness to Pay*), yang biasanya diekspresikan dalam bentuk uang (Nasir, 2009).

Pendekatan CVM pertama kali diperkenalkan oleh Robert Davis dalam disertasinya pada tahun 1963, yang bertujuan untuk menilai nilai taman berburu di Miami. Popularitas metode ini mulai meningkat sekitar pertengahan tahun 1970-an ketika Pemerintah Amerika Serikat mulai mengadopsi pendekatan ini untuk melakukan studi-studi tentang sumber daya alam. Hingga kini, metode ini sering digunakan baik di negara-negara maju maupun berkembang untuk menghitung nilai sumber daya alam.

Sebuah penelitian mengenai penilaian jasa lingkungan dengan menggunakan model ini dilakukan oleh Ragens (1991), yang mengestimasi Kesiediaan untuk Membayar (WTP) masyarakat untuk mengendalikan polusi air di wilayah pantai *Kristiansand Fjord*, Norwegia. Dalam penelitian tersebut, Ragens menggunakan variabel *dummy* berdasarkan umur, tingkat pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, dan persepsi masyarakat terhadap konservasi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, jenis kelamin, nilai awal (*starting point*), dan

persepsi terhadap pengendalian polusi (konservasi) memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan 5%.

Beberapa penelitian empiris telah mengungkapkan hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan dengan tingkat kesediaan membayar untuk pengelolaan sampah. Indramawan (2014) menyimpulkan bahwa pendidikan dan pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai kesediaan membayar untuk pengelolaan sampah. Kemudian menurut penelitian Ayenew et al. (2019) bahwa pendapatan *Willingness to Pay* Pengelolaan Sampah di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung berpengaruh terhadap kesediaan membayar. Masyarakat yang berpendapatan tinggi akan cenderung bersedia membayar lebih dibandingkan masyarakat yang berpendapatan rendah. (Ladiyance & Yuliana, 2014).

Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu membutuhkan biaya yang besar. Perlunya kerjasama antara pemerintah serta masyarakat. Berbagai sarana dan prasarana pembuangan sampah dengan menyumbangkan sisa pendapatan masyarakat setiap bulannya dan membantu pemerintah memisahkan sampah dari rumah masyarakat sebelum membawanya ke TPA dengan truk sampah merupakan salah satu aktifitas dalam mengatasi terbatasnya persediaan tempat pembuangan sampah.

Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu membutuhkan investasi yang besar. Pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangatlah diperlukan. Masyarakat dapat berkontribusi dalam penyediaan beberapa infrastruktur untuk pengelolaan sampah dengan cara menyisihkan sebagian dari pendapatannya setiap bulan. Masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam proses pemilahan sampah di rumah sebelum diangkut oleh truk sampah ke tempat pembuangan, mengatasi masalah keterbatasan lahan di tempat pembuangan sampah.

Penelitian oleh Subekti (2009) menyimpulkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting. Hal ini dimulai dari pemisahan sampah organik, anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di tingkat rumah tangga, sehingga hanya sisa-sisa sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Diperlukan pengawasan yang terus-menerus dari instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Menurut Saptutyingsih (2023) Urbanisasi yang pesat di negara-negara berkembang secara dramatis meningkatkan produksi limbah padat, sehingga memberikan dampak negatif terhadap sosio-ekonomi dan ekologi. Pengelolaan limbah padat sangat penting untuk meminimalkan risiko terkait, terutama terhadap kesehatan dan lingkungan. Sementara itu, infrastruktur dan peraturan penggunaan lahan masih buruk, sehingga menyebabkan buruknya sistem pengumpulan dan pembuangan sampah. Selain itu, pengelolaan sampah kota yang kurang memadai menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan, terutama di sekitar lokasi pembuangan.

Menurut Indramawan (2014), terdapat Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kesediaan membayar setiap individu antara lain adalah pendapatan dan tingkat pendidikan individu, yang menurut penelitian mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai kesediaan membayar individu. Namun, variabel seperti usia, ukuran keluarga, status pekerjaan, dan jenis kelamin tidak mempunyai dampak signifikan terhadap kesediaan masyarakat untuk membayar. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi dan berapa besarnya *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat Kecamatan Indramayu untuk peningkatan pengelolaan sampah?

## **B. Perumusan Masalah**

Ditinjau berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, belum ada penelitian yang meneliti tentang kondisi sosial ekonomi serta sarana dan prasarana terhadap kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) dalam pengelolaan sampah di kabupaten Indramayu. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji suatu permasalahan tersebut. Berdasarkan judul dan variabel terkait, maka dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besarnya *Willingness to Pay* terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu?
2. Apakah usia mempengaruhi besaran nilai kesediaan membayar *Willingness to Pay* di Kabupaten Indramayu?
3. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi besaran nilai kesediaan membayar *Willingness to Pay* di Kabupaten Indramayu?
4. Apakah pendapatan mempengaruhi besaran nilai kesediaan membayar *Willingness to Pay* di Kabupaten Indramayu?
5. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana mempengaruhi besaran nilai kesediaan membayar *Willingness to Pay* di Kabupaten Indramayu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengukur besarnya jumlah *Willingness to Pay* terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu
2. Menganalisis pengaruh usia terhadap *Willingness to Pay* pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu.

3. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap *Willingness to Pay* pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu.
4. Menganalisis pengaruh jumlah pendapatan terhadap *Willingness to Pay* pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu.
5. Menganalisis pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana terhadap *Willingness to Pay* pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis

Penelitian ini adalah salah satu cara penulis dalam mengimplementasi ilmu yang telah didapatkan dalam bentuk berbagai macam teori yang dipelajari ataupun beberapa teori baru yang telah diketahui. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan teori yang sudah ada dengan kebenaran yang terjadi di lapangan.

2. Bagi pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi para pembaca atau peneliti yang menulis penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, khususnya daerah kabupaten Indramayu supaya lebih memperhatikan hal-hal kecil seperti sampah agar kabupaten Indramayu lebih baik dalam hal pengelolaan dan pengendalian sampah. Hal tersebut tidak hanya dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu, terlebih juga bagi pemerintah pusat supaya kota-kota padat penduduk lainnya dapat memperhatikan pengelolaan sampah.